

**PENGARUH UKURAN DAERAH, PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD), BELANJA MODAL DAN KOMPLEKSITAS  
TERHADAP KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi Empiris pada Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta Periode  
2015-2019)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi**



Santi Asmara Suci

1115 28275

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA  
YOGYAKARTA  
2021**

**SKRIPSI**

**PENGARUH UKURAN DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),  
BELANJA MODAL DAN KOMPLEKSITAS TERHADAP KELEMAHAN  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH**  
(Studi Empiris pada Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta Periode 2015-2019)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

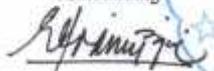
**SANTI ASMARA SUCI**

No Induk Mahasiswa: 111528275

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 2 Maret 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

**Susunan Tim Penguji:**

Pembimbing



Efraim Ferdinan Giri, Dr., M.Si., Ak., CA

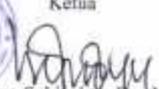
Penguji



Atika Jauharra Hatta, Dr., M.Si., Ak.

Yogyakarta, 2 Maret 2021  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta  
Ketua



  
Haryono Subiyanto, Dr., M.Si.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara kualitas pengaruh ukuran daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal dan kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap kelemahan pengendalian intern. Teori keagenan beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak *agent* (pemerintah daerah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah data 6 pemerintah daerah yang berasal dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah periode 2015-2019 dan data dari Badan Pusat Statistika (BPS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran daerah berpengaruh negatif (signifikan) terhadap kelemahan pengendalian intern, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kompleksitas memiliki pengaruh positif (signifikan) terhadap kelemahan pengendalian intern, sedangkan belanja modal tidak terdapat pengaruh negatif (signifikan) terhadap kelemahan pengendalian intern.

**Kata kunci:** Ukuran Daerah, PAD, Belanja Modal, Kompleksitas dan Kelemahan Pengendalian Intern.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## ABSTRACT

*The purposed of the study was to test the influence of size, local own source revenue, capital expenditure and complexity to internal control weakness of local government. Agency theory assumes that there were many information asymetry between the agents (local government) who had direct acces to information by the principals (the public). The existence of information asymetry allowed the occurence of fraud or corruption by local government.*

*This study used purposive sampling with 6 data from the financial statements Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2015-2019 period and data from Badan Pusat Statistika (BPS). The result indicated that local size has a significant negative effect on internal control weakness, local own source revenue and complexity has a significant positive effect on internal control weakness. However, the capital expenditure has no significant negative effect on internal control weakness.*

***Keywords : Local size, local own source revenue, capital expenditure, complexity and internal control.***

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Pendahuluan

Otonomi daerah dijalankan di Indonesia melalui UU No. 23 Tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah. otonomi daerah berfungsi untuk memperbaiki serta mengusahakan kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah juga memiliki tujuan yang penting dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat agar semakin baik serta pengembangan demokrasi di Indonesia (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>)

Sistem Pemerintahan di Indonesia saat ini menggunakan sistem Desentralisasi. Dengan adanya sistem desentralisasi ini dapat menunjukkan keyakinan dari pemerintah pusat jika Pemda mampu memajukan potensi yang terdapat di setiap daerahnya. Setiap daerah juga harus bisa mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan keuangan daerahnya secara transparansi, rasional, partisipatif dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan otonomi yang semakin meningkat, harus melakukan pemantauan yang baik dan teliti agar terhindar dari tindakan kecurangan. Berdasarkan KPMG New Zealand Forensic 2012 menuturkan jika pelaksanaan pengontrolan internal yang tidak baik dan terdapatnya titik lemah serta penyelewengan pada pengendalian internal adalah dua faktor penting yang menimbulkan tindakan curang. Di tahun 2008 bertempat di New Zealand sekitar 31% responden tahun 2008 terjadi tindakan curang yang dilakukan oleh pegawainya dikarenakan kualitas pengendalian internalnya tidak baik, dan di tahun 2012 bertambah tinggi sebanyak 35%. Disamping hal tersebut, hasil pemeriksaan memperlihatkan pada saat telah muncul kecurangan maka langkah utamanya dalam mengetahui kecurangan yang telah terjadi ialah dengan sistem pengendalian internal (KPMG, 2012).

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjelaskan jika, pengendalian internal ialah sebuah proses integral dalam perilaku dan aktivitas yang dilaksanakan secara kontinyu oleh pimpinan dan semua pegawai guna menyakinkan yang proporsional atau terwujudnya tujuan perusahaan dengan berbagai aktivitas yang efektif dan efisien, keunggulan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan kepatuhan pada Undang-Undang.

Kasus tentang SPIP itu mendapat perhatian yang cukup besar. Sejalan dengan UU No 15 tahun 2004 mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. BPK diantaranya memeriksa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah termasuk juga salah satu laporan yang diperiksa oleh BPK.

Kasus kelemahan pengendalian internal Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Utara terjadi dikarenakan masih terdapat beberapa catatan BPK, terkait dengan sistem pengendalian yaitu terjadinya kasus suap proyek pengerjaan infrastruktur di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara tahun 2017 (<http://www.tempo.com>). Selain itu juga pemerintah provinsi Sumatera Utara mendapatkan WTP dari BPK Akan tetapi ada banyak pelanggaran, ketidak disiplin maupun temuan terhadap sistem pengendalian internal sendiri dan ketidakpatuhan pada Undang-Undang. hal ini menjadi kecurigaan bagi auditor internal itu sendiri setelah kasus pesanan WTP setelah operasi tangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kementerian Desa (<http://www.news.metro24jam.com>)

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Salah satu faktor yang memberikan pengaruh terjadinya kelemahan pengendalian internal ialah ukuran daerah sebuah entitas. Hal ini didukung oleh penelitian Iqbal (2017) mengungkapkan jika ukuran mempengaruhi kelemahan pengendalian intern. Petrovist (2010) mengungkapkan jika ukuran perusahaan berhubungan negative pada kelemahan pengendalian internal perusahaan. Kristanto (2009) membuktikan jika ukuran pemerintah berpengaruh positif pada kelemahan pengendalian internal. Martini dan Zaelani (2011) sedangkan Sari (2016) membuktikan jika ukuran mempengaruhi secara negatif pada kelemahan pengendalian intern.

Dalam penelitian ini proksi ukuran daerah bisa dinilai dengan total asset, alasan pemakaian total asset menjadi proksi dari ukuran pemerintah daerah dengan dasar penelitian terdahulu yang dilaksanakan Martani dan Zaelani (2011) yang membuktikan jika terdapat pengaruh ukuran pada kelemahan pengendalian intern. Hal tersebut terkait dengan sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan sistem pengendalian intern. Suatu perusahaan yang tinggi pun mempunyai sumber daya ekonomi yang lebih banyak guna mengimplementasikan sistem pengendalian layaknya mengadakan pelatihan dan konsultasi sistem pengendalian intern. Bisa diberikan kesimpulan jika makin besar total asset sebuah perusahaan maka permasalahan pengendalian internnya akan makin rendah.

PAD menjadi penentu terjadinya kelemahan pengendalian intern sebuah Pemda. Pada penelitiannya Petrovist (2010) membuktikan jika sumber pendapatan menjadikan permasalahan pengendalian internal dalam sebuah perusahaan makin meningkat. Fakta tersebut dikuatkan dengan penelitiannya Martani dan Zaelani (2011) yang juga membuktikan jika PAD berhubungan positif dengan kelemahan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pengendalian intern sebuah Pemda. Fathoni Sidiq Ari Wibowo (2018) menyatakan adanya hubungan PAD terhadap kelemahan pengendalian intern. Sementara itu pada penelitian Puspitasari (2013) dan Hartono (2014) tidak membuktikan terdapatnya korelasi antara PAD dan kelemahan pengendalian intern sebuah Pemda. Hasil penelitian yang sudah pernah dilaksanakan memperlihatkan hasil berbeda-beda dengan begitu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai hal sama.

Belanja Modal juga menjadi faktor penentu munculnya kelemahan pengendalian intern dalam sebuah Pemda. Hal tersebut dikuatkan dengan penelitiannya Abdullah dalam Kristanto (2009) membuktikan jika belanja modal mempengaruhi kelemahan pengendalian intern. Hal tersebut dikarenakan makin besar anggaran belanja modal yang tak diimbangi dengan sistem pengendalian yang lebih baik, maka akan banyak menimbulkan penyelewengan belanja modal sebagai media korupsi oleh pihak legislative dan eksekutif yang bertanggung jawab. Makin banyak jumlah belanja modal yang sebuah daerah miliki maka anggaran dalam pengadaan asset akan bertambah tinggi. Tanpa pengendalian intern pemerintah yang baik itu kecurangan dan penyelewengan belanja modal lebih mudah dilaksanakan sebab kurangnya pengontrolan. Sedangkan Aini (2017) dan Iqbal (2017) menemukan jika belanja modal tidak mempengaruhi kelemahan pengendalian intern. Alasan pengambilan belanja modal dalam penelitian ini sebab masih belum begitu banyak riset mengenai pengaruh belanja modal pada kelemahan pengendalian inter pada suatu Pemda, dengan begitu sangat penting untuk dilaksanakan penelitian lagi.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kompleksitas juga bisa memberikan pengaruh pada kelemahan pengendalian intern. Ge dan Mc. Vay (2005) membuktikan jika perusahaan dengan kompleksitas transaksi mempunyai kelemahan pengendalian intern besar. Aini (2007) membuktikan jika adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara kompleksitas suatu Pemda (banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah) pada kelemahan pengendalian intern dalam suatu Pemda. Hartono (2014) membuktikan jika terdapatnya korelasi antara kompleksitas pemerintah daerah (banyaknya kecamatan) dengan kelemahan pengendalian intern sebuah Pemda. Sementara itu, penelitiannya Martani dan Zaelani (2011) tidak membuktikan adanya korelasi antara kompleksitas pemerintah daerah dengan kelemahan pengendalian intern. Perbedaan proksi dalam penelitian terdahulu dan hasilnya yang berbeda-beda menjadikan daya Tarik penulis untuk mengadakan penelitian. Dalam penelitian ini kompleksitas pemerintah daerah akan diproksikan dengan banyaknya SKPD, jumlah kecamatan, dan jumlah penduduk.

Beranjak dari latar belakang permasalahan, hasil penelitian terdahulu yang berbeda serta beragam masalah yang berkaitan dengan pengendalian intern dimana sudah diuraikan, maka penulis mempunyai ketertarikan untuk melaksanakan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Ukuran Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Kompleksitas terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta Periode 2015-2019).**

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Teori Keagenan (*Agency Theory*)

*Agency theory* berkaitan pada hubungan kontraktual dari dua pihak yakni *principal* dengan *agent*. *Agency theory* menguraikan mengenai hubungan keagenan yang mana satu pihak mewakilkan pekerjaan pada pihak lainnya yang menyelenggarakan pekerjaan. Teori keagenan menilai jika *agent* tidak bisa dipercaya dalam berbuat yang sebaik-baiknya untuk keperluan *principal* (Tricker 1984 dalam Puspitasari 2013).

Eisenhardt (1989) dalam penelitiannya Sukandar (2014) menyatakan teori keagenan memaparkan mengenai pola hubungan diantara *principal* dengan *agen*. *Principal* menjadi pihak yang memberi mandate pada *agen*, sementara *agen* ialah pihak yang melaksanakan perintah *principal*. teori keagenan memiliki tujuan yaitu pertama dalam menaikkan kekuatan individu (yakni *principal* dan *agen*) untuk melakukan evaluasi lingkungan dimana perlu sebuah penetapan keputusan. Kedua dalam melakukan evaluasi hasil dari keputusan yang telah ditetapkan untuk melancarkan pembagian hasil diantara *principal* dengan *agen* berdasarkan perjanjian kerja.

Berdasarkan *agency theory*, pengamatan pengelolaan Pemda harus diamat guna memastikan pengelolaan diselenggarakan sesuai ketaatan pada aturan serta ketentuan yang berlaku. Pemda harus meningkatkan akuntabilitas supaya berkurangnya *information asymmetry* yang diterima masyarakat (Puspitasari, 2013).

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Metode Penelitian

Peneliti menerapkan metode penelitian kuantitatif yang melibatkan data sekunder dari pemerintah daerah provinsi DI Yogyakarta. Metode penelitian ini sifatnya induktif, objektif dan ilmiah yang mana datanya didapatkan berbentuk angka ataupun pertanyaan yang diberi nilai. Hasil yang didapatkan berdasar analisis statistik.

Populasi ialah area generalisasi yang mencakup objek maupun subjek yang mempunyai atribut dan ciri khas khusus yang peneliti tentukan untuk dikaji dan diambil simpulannya (Sugiyono, 2014: 115). Populasi yang diteliti ialah 6 kabupaten/kota di Provinsi DI Yogyakarta pada periode 2015-2019 yang terdiri dari 1 Provinsi DIY, 4 kabupaten dan 1 kota.

Peneliti memilih sampel menerapkan pendekatan *purposive sampling*, sehingga sampel yang dipilih ialah Pemda di Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta periode 2015-2019 yang memenuhi kriteria tertentu. Adapun kualifikasi sampelnya ialah:

1. Pemda Kabupaten/kota di provinsi DIY yang mempublikasikan LKPD tahun 2015-2019 yang melampaui audit BPK.
2. Pemda Kabupaten/kota di provinsi DIY yang mempunyai data jumlah temuan kelemahan pengendalian intern yang dikeluarkan BPK.
3. Mempunyai informasi variabel yang hendak dilakukan pengukuran yakni ukuran daerah (total aset), PAD, Belanja Modal, dan Kompleksitas (Jumlah Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Jumlah SKPD).

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan metode pemilihan sampelnya yakni pendekatan *purposive sampling*, sehingga banyaknya sampel yang didapatkan dan dipergunakan untuk diteliti ialah 6 populasi yang ada, didapatkan dari semua populasi sebagai sampel pada 5 periode, sehingga sampelnya sejumlah 30 sampel.

Data yang peneliti gunakan ialah data sekunder yang berbentuk LKPD kabupaten atau kota di wilayah DIY dan LHP yang dipublikasikan BPK dan diakses langsung dari *website* BPK ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)). Sedangkan informasi banyaknya kecamatan dan penduduk diakses langsung dari *website* BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ([www.yogyakarta.bps.go.id](http://www.yogyakarta.bps.go.id)).

## Kesimpulan

Beranjak dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan maka bisa disimpulkan seperti di bawah ini:

1. Ukuran daerah mempengaruhi secara negatif secara signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Makin besar ukuran pemerintah daerah maka kelemahan pengendalian internnya akan semakin kecil.
2. PAD mempengaruhi secara positif secara signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Semakin banyak jumlah sumber pendapatan yang terdapat pada Pendapatan Asli Daerah, justru akan membuat masalah pada pengendalian intern
3. Belanja modal tidak mempengaruhi secara negatif secara signifikan pada kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.
4. Kompleksitas mempengaruhi secara positif secara signifikan pada kelemahan pengendalian intern daerah. Semakin banyak segmen atau cabang organisasi

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

maka kasus terhadap kelemahan pengendalian intern yang terjadi akan semakin banyak.

5. Ukuran daerah, PAD, belanja modal, dan kompleksitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Keempat variable tersebut menjelaskan kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah sebesar 41,5%, sedangkan 58,5% dijelaskan oleh variable lain di luar penelitian.

## Saran

Mengacu dari hasil penelitian dan kesimpulannya tersebut, ada beberapa saran yang penulis sampaikan:

1. Pemda diharapkan dapat melakukan perbaikan mekanisme pengendalian yang ada di setiap daerahnya dan meningkatkan pemantauan pengendalian untuk mencegah terjadinya kecurangan, dikarenakan kedua komponen ini menjadi faktor penyebab terbesar kasus kecurangan akibat kelemahan pengendalian intern yang ada di daerah.
2. Bagi peneliti berikutnya, peneliti menyarankan untuk memperbanyak jumlah sampelnya dan tahun pengamatan yang lebih panjang jadi hasil yang didapatkan akan menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
3. Bagi peneliti berikutnya, peneliti menyarankan untuk menambahkan variabel lain sebagai faktor yang dapat mempengaruhi keberadaan pengendalian intern pemerintah daerah, seperti komitmen organisasi. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan pengukuran dan proksi yang berbeda.
4. Bagi peneliti berikutnya, peneliti menyarankan untuk menggunakan data primer, seperti kuesioner maupun interview ke kantor pemerintah atau institusi

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pemerintah lain untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai keberadaan pengendalian intern pemerintah daerah.

## **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang mungkin bisa memperlemah hasil penelitiannya. Adapun keterbatasannya yaitu:

1. Populasinya ialah Pemda di wilayah Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta yang mempublikasikan laporan keuangan dan sudah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di tahun 2015-2019, diperoleh sampelnya sebanyak 6 pemerintah daerah kabupaten/kota. Sampel pada penelitian ini dapat dikatakan sedikit sehingga ada kemungkinan kurang dapat menggambarkan kondisi populasi yang sebenarnya dan hasil penelitian kurang dapat digeneralisasikan.
2. Penelitiannya cuma memakai 5 variabel, yakni 1 variabel terikat yakni pengendalian intern dan 4 variabel bebas yakni ukuran daerah, PAD, belanja modal dan kompleksitas Pemda ditinjau dari mengkombinasi jumlah penduduk, jumlah kecamatan dan jumlah SKPD.
3. Penelitian ini hanya memakai data sekunder, sehingga ketepatan, kelengkapan serta kebenaran data yang akan dianalisis pada penelitian ini sangat bergantung pada ketersediaan data sekunder, dalam hal ini data sekundernya didapat dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang memuat data mengenai LKPD, data temuan atau kasus pengendalian intern dan data jumlah SKPD; BPS yang memuat data tentang jumlah penduduk dan jumlah kecamatan.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Halim. (2004). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali, *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI*, 16-17 Oktober 2003, Surabaya.
- Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Skripsi Sarjana. FEB UNDIP. Semarang
- Aini, F. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kompleksitas Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia periode 2011-2012). *JOM Fekon, Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017*, 777-789.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta. *yogyakarta dalam Angka 2015-2019*. yogyakarta.bps.go.id diakses pada 26 Januari 2021
- Committee of Sponsoring Organizations of The Threadway Commission. Internal Control – Integrated Framework 1992. www.coso.org diakses pada 23 Januari 2021.
- Doyle, J., & Weili Ge, D. S. (2007). Determinants of Weakness in Internal Control over Financial Reporting. *Journal of Accounting and Economic 44, 2007*, 193-223.
- Fatmawati, R. d. (2018). Dampak Pengendalian Intern dan Ketepatan Informasi Terhadap Kebermanfaatan Akuntansi Akruar: Studi Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis Vol. 5(2), 2018*, 137-150.
- Ge dan McVay (2005). The Disclosure of Material Weaknesses in Internal Control After the Sarbanes-Oxley Act. *Accounting Horizon, 19(3)*, 137-158.
- Hartono, Rudi. 2014. Pengaruh Pertumbuhan, *Size*, Penadapatan Asli Daerah (PAD) dan Kompleksitas terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Empiris pada Pemerintahan Provinsi se Indonesia tahun 2011. *Skripsi Sarjana*. FE UNNES. Semarang.
- <http://nasional.tempo.co/read/909240/ott-bupati-batubara-kpk-nilaipengawasan-internpemerintah-lemah/19/11/2017>
- <http://news.metro24jam.com/read/2017/05/31/31877/pemberianopini-wtp-ke-pemprovsumencurigakan/19/11/2017>

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Iqbal, M. (2017). Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Riau dan Sumatera Barat). *JOM Fekon Vol. 4 No. 1 (Februari 2017)*, 881-897.
- KPMG. (2012). *Internal Survey of Corporate Responsibility Reporting*. Forensic: Fraud Survey. New Zealand.
- Kristanto, Septian Bayu. 2009. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Intern. *Jurnal Akuntansi UKRIDA, Volume 9, No.1*.
- Larasati Agustina dan Supatmi. (2013). *Pengungkapan Informasi aset keuangan dan Impairment-nya di Perbankan menurut PSAK 50 dan 60*. Publikasi Ilmiah. UMS. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UKSW Salatiga.
- Martani dan Zaelani (2011). Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Kasus di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*.
- Petrovits, Christine, Shakespeare, Chaterine, dan Shih, Aimee. (2010). *The Causes and Consequences of Internal Control Problems in Nonprofit Organizations*.
- PMK No. 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran.
- Pujiono, D. S., & Sukarno, H. d. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah (Studi di Provinsi Maluku Utara). *Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 10 No. 1 Januari 2016*, 68-81.
- Puspitasari, Titus. 2013. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kompleksitas Daerah (SKPD) terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Skripsi Sarjana*. FEB Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Putri, Novi Kumala. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran dan Kompleksitas terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Wilayah Indonesia Bagian Barat tahun 2012). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Putro, Prima Utama Wardoyo. 2013. Pengaruh PDRB, Ukuran dan Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Asli daerah sebagai Variabel *Intervening*. *Skripsi Sarjana*. FE UNNES. Semarang
- Sari, Lenni. M. (2018). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Kompleksitas Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara Periode 2012-2015). *JOM Fekon, Vol.1 Ed.1 (Januari – Juni 2018)*, 1-15.
- Sari, Vera Laksita. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Dan Kompleksitas terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Pulau Jawa). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi STIE YKPN Yogyakarta.
- Sukandar.(2014). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Dan Dewan Komisaris Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan manufaktur sektor *consumer good* yang terdaftar di BEI tahun 2010– 2012).*Skripsi*. UNDIP2014.
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Wibowo, Fathoni Sidiq Ari. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/ Kota di Pulau Jawa). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Warren. (2003). Accounting. 20th edition. South Western. Mason- Ohio